

BAB I

PENDAHULUAN

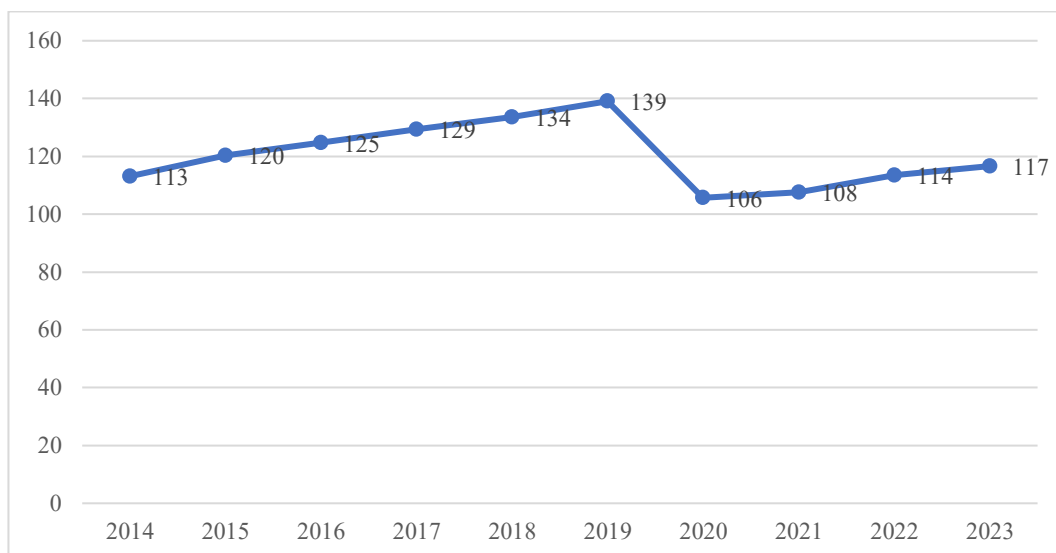
1.1 Latar Belakang

Stabilitas harga merupakan salah satu indikator fundamental dalam perekonomian suatu negara. Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi parameter utama dalam mengukur tingkat inflasi dan mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, dinamika Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan ekonomi dan moneter karena dampaknya yang signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika IHK secara komprehensif, penting untuk meninjau tidak hanya kondisi domestik, tetapi juga berbagai faktor global yang turut memengaruhi tingkat inflasi. Perubahan harga komoditas dunia, nilai tukar, serta kebijakan ekonomi di negara lain merupakan variabel penting yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas harga di Indonesia.

Secara global, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) maupun penawaran (*cost-push inflation*). Faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan dinamika ekonomi global dapat mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral juga memainkan peran penting dalam mengendalikan laju inflasi.

Fenomena umum yang terjadi di Indonesia adalah ketidakstabilan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sering kali berfluktuasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami periode IHK yang tinggi, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Dalam konteks teori ekonomi makro, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan Teori Keynesian, yang menekankan pentingnya peran permintaan agregat dalam menentukan tingkat harga dan output. Menurut Keynes, inflasi yang tercermin melalui peningkatan IHK dapat terjadi ketika permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi nasional, sehingga mendorong tekanan harga ke atas (Keynes, 1936 dalam Pratiwi dan Prasetyia, 2021). Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya peran intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian (Blanchard & Johnson, 2017).

Konsep-konsep inflasi yang dijelaskan dalam teori ekonomi makro, seperti pendekatan Keynesian, dapat diamati secara nyata dalam dinamika perekonomian Indonesia. Salah satu indikator yang mencerminkan gejala tersebut adalah fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan tekanan inflasi dari berbagai sumber, baik domestik maupun global. Di Indonesia, laju inflasi kerap kali fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik maupun global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5,47%, dimana komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) dan harga bergejolak (*volatile food*) memberikan kontribusi yang besar. Indonesia menghadapi fluktuasi Indeks Harga Konsumen yang cukup dinamis pada periode tahun 2014 - 2023.



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia tahun 2014 – 2023
(Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, IHK berada pada angka 113% dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 139% pada tahun 2019. Kenaikan ini mencerminkan tren inflasi yang stabil serta pertumbuhan permintaan domestik yang cukup kuat selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam dalam IHK menjadi 106%, yang menandai dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Pembatasan aktivitas, penurunan daya beli, serta terganggunya rantai pasokan menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada menurunnya tekanan inflasi.

Seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi pada tahun 2021, IHK sedikit meningkat menjadi 108%, didorong oleh pelonggaran pembatasan mobilitas, percepatan program vaksinasi, serta berbagai stimulus fiskal dan moneter yang diberikan oleh pemerintah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan IHK masing-masing tercatat sebesar 114% dan 117%. Kenaikan IHK

pasca pandemi ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain pemulihan konsumsi domestik, kenaikan harga energi dan pangan global, serta gangguan rantai pasok yang masih terjadi.

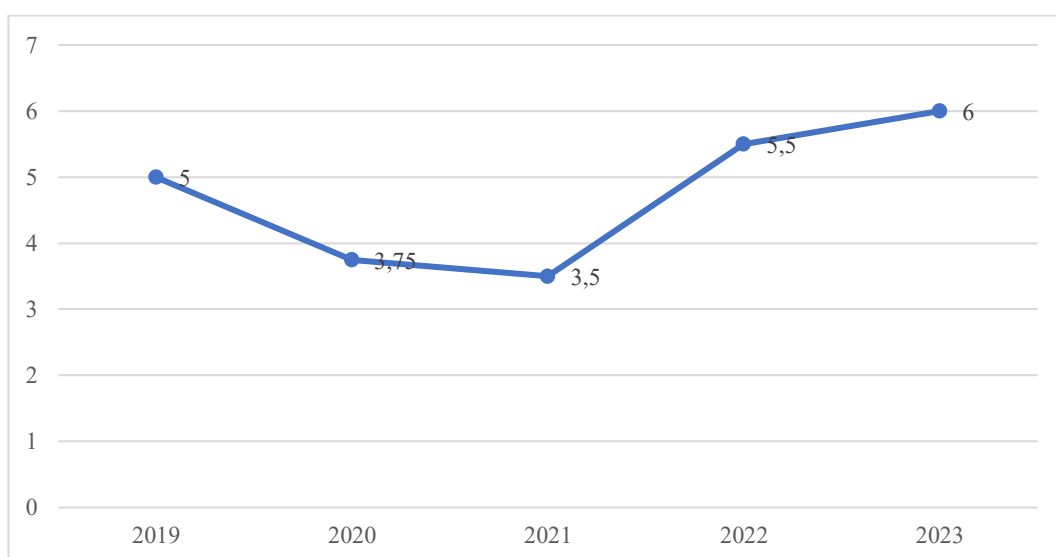
Meskipun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, secara keseluruhan grafik menunjukkan bahwa IHK terus mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya tekanan inflasi yang berlangsung secara bertahap, yang berdampak terhadap daya beli masyarakat dan perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan

Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kenaikan IHK ini antara lain, penyesuaian *BI Rate* yang mempengaruhi daya beli masyarakat melalui suku bunga kredit, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang memicu kenaikan harga barang impor. Selain itu, faktor musiman seperti peningkatan permintaan saat Ramadan dan Idul Fitri, serta akhir tahun juga dapat memberikan kontribusi pada lonjakan inflasi, terutama pada sektor pangan dan transportasi.

Dari sisi kebijakan moneter, *BI Rate* memainkan peran strategis dalam pengendalian inflasi atau indeks harga konsumen. Bank Indonesia (2023) mendefinisikan *BI Rate* sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan *stance* kebijakan moneter dan menjadi acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Teori Transmisi Kebijakan Moneter yang dikembangkan oleh Mishkin (2019) menjelaskan bahwa perubahan suku bunga acuan mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi melalui jalur suku bunga, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat harga. Studi yang dilakukan oleh Pratama dan Sulistiowati (2022), menunjukkan bahwa kenaikan *BI Rate*

sebesar 100 basis poin dapat menurunkan IHK sebesar 0,4-0,6% dalam jangka menengah. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2023) mengungkapkan bahwa setiap kenaikan *BI Rate* sebesar 25 basis poin rata-rata memberikan dampak penurunan IHK sebesar 0,15% dalam jangka waktu 3-6 bulan. Namun, efektivitas kebijakan suku bunga dalam mengendalikan IHK sering terkendala oleh lag waktu dalam transmisi kebijakan moneter.

Berikut adalah perkembangan *BI Rate* dalam 5 (lima) tahun terakhir:



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1.2
Perkembangan *BI Rate* Indonesia tahun 2019 – 2023 (Persen)

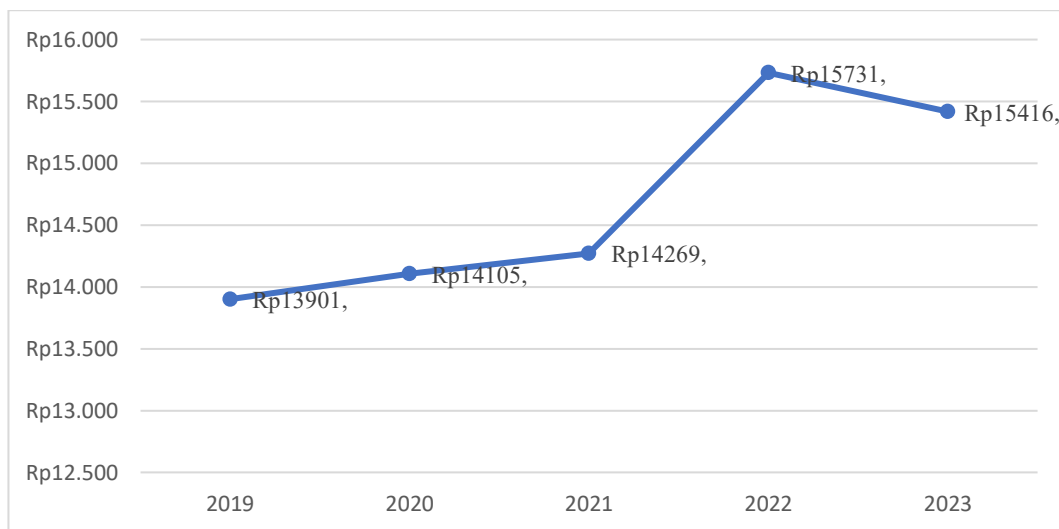
Berdasarkan Gambar 1.2 memperlihatkan tren fluktuatif suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, *BI Rate* berada di angka 5%, mencerminkan kebijakan moneter yang masih relatif ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Memasuki tahun 2020 hingga 2021, BI secara bertahap menurunkan suku bunga hingga mencapai titik terendah sebesar 3,5%. Penurunan ini merupakan bagian dari strategi pelonggaran kebijakan moneter sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk

merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas, mendorong konsumsi, serta mempermudah akses kredit bagi sektor usaha dan rumah tangga.

Namun, tren ini berubah sejak tahun 2022, ketika BI mulai menaikkan suku bunga menjadi 5,5%, dan kembali meningkat menjadi 6% pada tahun 2023. Kenaikan suku bunga ini didorong oleh tekanan inflasi global akibat lonjakan harga energi dan pangan, dampak ketegangan geopolitik, serta gangguan rantai pasok global. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menahan potensi arus modal keluar (*capital outflow*), dan mempertahankan daya saing aset keuangan domestik. Kebijakan ini mencerminkan sikap BI yang lebih berhati-hati dalam menjaga inflasi agar tetap dalam kisaran target, yaitu sekitar 3%, serta menarik minat investor asing melalui peningkatan imbal hasil instrumen keuangan di pasar domestik.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memiliki pengaruh substansial terhadap IHK melalui mekanisme *pass-through effect*. Dalam teori *Purchasing Power Parity* yang dikemukakan oleh Gustav Cassel, perubahan nilai tukar akan mempengaruhi harga relatif barang domestik dan impor. Penelitian Kurniati dan Sahminan (2021), menemukan bahwa depresiasi rupiah sebesar 1% berkontribusi pada kenaikan IHK sebesar 0,15-0,20% melalui *imported inflation*. Fenomena ini diperkuat oleh *Exchange Rate Pass-Through Theory* yang dikembangkan oleh Taylor (2000), yang menjelaskan bagaimana fluktuasi nilai tukar ditransmisikan ke dalam harga domestik.

Apresiasi atau depresiasi rupiah dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga barang. Berikut pergerakan nilai tukar atau Kurs Rupiah terhadap US dollar.



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1.3
Perkembangan Kurs Rupiah per 1 USD tahun 2019 – 2023
(Rupiah)

Gambar 1.3 menunjukkan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai tukar tercatat sebesar Rp13.901 per USD, menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2022, nilai tukar mengalami pelemahan berturut-turut hingga mencapai Rp15.731 per USD.

Pelemahan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi global, menurunnya aktivitas perdagangan internasional, serta berkurangnya aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, kebijakan *lockdown* dan pembatasan mobilitas di berbagai negara turut menghambat permintaan ekspor-impor, yang berdampak pada neraca perdagangan dan stabilitas

nilai tukar. Meskipun pandemi mulai mereda pada tahun 2021, dampaknya masih dirasakan hingga tahun 2022. Tahun tersebut menjadi masa pemulihan ekonomi, di mana pemerintah dan pelaku usaha mulai menyesuaikan diri dengan kondisi pasca pandemi. Selama masa ini, ketidakpastian global dan gejolak pasar keuangan masih menjadi faktor yang menekan nilai tukar Rupiah. Memasuki tahun 2023, nilai tukar mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan atau stabilisasi, seiring dengan pulihnya kepercayaan investor, meningkatnya ekspor komoditas unggulan, serta berbagai upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter dan nilai tukar melalui intervensi pasar dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter.

Meskipun berbagai instrumen kebijakan moneter dan fiskal telah diterapkan, pengendalian inflasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas *BI Rate*, dan nilai tukar dalam mempengaruhi IHK tidak selalu konsisten akibat kompleksitas interaksi antar variabel makroekonomi tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi indeks harga konsumen. Pada 2022, Bank Indonesia melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan *BI Rate* untuk meredam tekanan inflasi. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah yang sempat melemah hingga Rp15.700/USD memberikan tekanan tambahan pada harga barang impor dan biaya produksi dalam negeri. Berbagai upaya untuk menstabilkan inflasi melalui kombinasi kebijakan moneter dan fiskal terus dilakukan, namun hasilnya belum optimal.

Faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas internasional, kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika ekonomi global turut mempengaruhi tingkat

inflasi di suatu negara. Dalam konteks kebijakan moneter, suku bunga acuan (*BI Rate*) sering digunakan sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap harga barang dan jasa.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pratiwi dan Prasetyia (2021), menunjukkan bahwa *BI Rate* memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek, tetapi dampaknya melemah dalam jangka panjang. Selain itu, Penelitian Anwar (2021) menggunakan metode VAR hanya fokus pada hubungan *BI Rate* dan IHK, sementara studi Rahmawati (2022) dengan pendekatan ARDL berfokus pada pengaruh nilai tukar terhadap IHK. Namun, studi mengenai keterkaitan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabel ini dengan IHK di Indonesia menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)* masih terbatas.

Penggunaan pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)* dalam analisis Indeks Harga Konsumen (IHK) didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel ekonomi. VECM sangat relevan untuk data *time series* yang bersifat tidak stasioner namun memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (*cointegration*), seperti IHK dengan variabel-variabel makro lainnya, misalnya nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Model ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejauh mana *shock* jangka pendek terhadap salah satu variabel akan memengaruhi IHK dan bagaimana sistem secara bertahap kembali menuju keseimbangannya. Selain itu, VECM memberikan informasi mengenai kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*), yang penting untuk memahami respons IHK terhadap perubahan ekonomi yang

terjadi secara tiba-tiba (Enders, 2015; Gujarati & Porter, 2019). Dengan demikian, meskipun masih terbatas digunakan di Indonesia, VECM merupakan pendekatan yang tepat dan unggul untuk menganalisis dinamika inflasi yang kompleks dan saling terkait.

Research gap yang ada dalam studi ini terletak pada kurangnya penggunaan model VECM dalam konteks Indonesia, terutama dalam analisis Indeks Harga Konsumen dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti *BI Rate*, dan nilai tukar. Dengan menggunakan VECM, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dari variabel *BI Rate* dan nilai tukar mana yang lebih dominan memengaruhi Indeks Harga Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti, *Bi Rate* dan nilai tukar Rupiah dapat mempengaruhi Indeks Harga Konsumen di Indonesia dengan metode VECM. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *BI Rate* dan Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia dengan Pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM) tahun 2019-2023”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan *BI Rate* dan Nilai Tukar?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia?

3. Bagaimana kondisi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai akibat dari *shock* yang ditimbulkan oleh *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah?
4. Apakah Variabel yang lebih dominan memengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK)?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Hubungan kausalitas dari *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.
2. Hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.
3. Kondisi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai akibat dari *shock* yang ditimbulkan oleh *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah.
4. Variabel yang lebih dominan memengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggunakan variabel *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah, yang

jarang diteliti secara bersamaan dengan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak yang melakukan penelitian dengan topik yang sama serta permasalahan yang sama, ataupun ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi.
- b. Bagi pemerintah, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan lingkup Perekonomian Indonesia. Peneliti melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu publikasi laporan indeks harga konsumen, *BI Rate* dan nilai tukar Rupiah melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan jurnal- jurnal terkait.

